

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Besarnya penduduk Indonesia yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani menimbulkan banyak petani yang ingin bercocok tanam tetapi tidak mempunyai lahan ataupun modal. Oleh sebab itu, sebagai sarana ataupun jalur buat memberikan peluang kepada petani yang tidak mempunyai lahan pertanian hingga diadakanlah sesuatu wujud perjanjian antara pemilik lahan, dengan petani penggarap dengan mempraktikkan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Sistem kemasyarakatan Indonesia sendiri, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang terdahulu, dengan nama dan istilah yang berbeda, antara lain: *maro* di Jawa Tengah, *Mertelu* di Jawa Timur, *Nengah* atau *Jejuron* di Jawa Barat, *Memperduai* di Sumatera Barat, *Toyo* di Minahasa dan *Teseng* di Sulawesi selatan.<sup>2</sup>

Dalam fiqh muamalah, kerjasama dalam pengelolaan sawah dapat dikategorikan sebagai akad *muzāra'ah* yang merupakan salah satu bentuk tradisi masyarakat Arab yang dilegalisasi dalam Islam dalam bentuk kerjasama pengelolaan atas lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak penggarap. Akad *muzāra'ah* ini biasanya dilakukan dengan didasarkan pada keinginan pemilik lahan untuk mengalihkan pengelolaan

---

<sup>2</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, 5th edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). Hlm. 27.

lahan pertaniannya kepada pihak petani penggarap dengan ditanami dengan berbagai varian tanaman pertanian dan dipelihara hingga diperoleh hasil yang akan dibagi di antara para pihak sesuai dengan kesepakatan terhadap hasil panen yang diperoleh.<sup>3</sup>

Menyangkut pembagian hasil tanah dari bagi hasil, dalam ketentuan Hukum Ekonomi Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas. Maksudnya, tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa jumlah bagian masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap). Dalam akad *muzāra'ah* pihak pemilik sawah dan penggarap harus membuat pernyataan yang jelas tentang jangka waktu pengelolaan dan penggarapan sawah dalam kontrak tersebut. Jangka waktu tersebut penting disepakati dari awal untuk menegaskan komitmen para pihak terhadap tempo waktu agrobisnis akan dilakukan. Bahkan para fuqaha menyatakan kesepakatan waktu sebagai hal substansif dalam perjanjian *muzāra'ah* karena dalam akad ini mengandung makna akad *ijarah*<sup>4</sup>. Pihak penyewa dalam hal ini petani harus membayar biaya sewa dengan imbalan dari sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya akan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Saat menentukan bagian dari pembagian hasil harus ditentukan karena akad *muzāra'ah* ini dilakukan. Bagi hasil harus ditentukan dalam

---

<sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 99

<sup>4</sup>Akad *ijarah* yang identik dalam akad *muzāra'ah* ini yaitu *ijarah bi al-manfa'ah* karena pihak petani menggunakan dan memperoleh manfaat dari harta yang bukan miliknya, sehingga hasil usahanya merupakan produktifitas atau benefit yang diperoleh dari objek yang tidak menghabiskan objek itu sendiri.

bentuk nisbah atau persentase sesuai kesepakatan, apakah merupakan setengah dari hasil panen sehingga semua pihak dapat memperoleh setengah dari hasil usaha, atau sepertiga atau bahkan seperempat. Kesepakatan itu sudah dikonfirmasi sejak awal kontrak. Bagian pembagian keuntungan ditentukan sejak awal untuk menghindari kesalahpahaman di antara para pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, dan penetapan tidak boleh didasarkan pada jumlah yang mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena keseluruhan panen mungkin jauh lebih rendah dari hasil panen, atau mungkin jauh lebih tinggi dari hasil panen.<sup>5</sup>

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak saling merugikan. Dalam hal ini *muzāra'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* adalah akad yang tepat digunakan oleh pihak pemilik sawah, dan penggarap sawah. Namun masih banyak orang yang belum mengetahui hukum bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian. Ketidaktahuan mereka dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan keuntungan sekalipun itu merugikan orang lain.

*Muzāra'ah* merupakan kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik lahan dengan penggarap lahan ataupun sawah, dimana bibit yang hendak ditanam berasal dari pemilik lahan. Sebaliknya *mukhabarah* merupakan kerja sama di bidang pertanian antara pihak pemilik lahan

---

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, hlm. 618.

dengan penggarap lahan ataupun sawah dimana bibit yang ditanam berasal dari penggarap lahan. Dalam kedua akad tersebut biaya perawatan tumbuhan ditanggung oleh penggarap lahan. Sebaliknya Musaqa merupakan akad antara pemilik tanah dengan pekerja untuk memelihara pohon/ tanaman, sebagai upahnya merupakan hasil dari pohon/ tanaman yang diurusnya.<sup>6</sup>

Ada tiga bentuk hubungan antara pemilik sawah dan petani. Pertama, penyewa menyewakan sawah tersebut kepada pemilik sawah. Pemilik sawah memperoleh pendapatan dari sewa penggarap, dan penggarap memperoleh pendapatan dari perusahaan sawah tersebut. Kedua, seorang petani yang menjadi buruh tani dengan upah (gaji) tertentu dari penggarap sawah, biasa disebut buruh tani harian. Upah harian pekerja kontrak ditentukan berdasarkan jumlah hari kerja. Ketiga, pemilik sawah memberikan hak kepada penggarap untuk menggarap sawahnya, kemudian membagikan hasilnya kepada pemilik sawah sesuai kesepakatan (bagi hasil). Pemilik sawah atau petani padi dapat menyediakan benih padi, pupuk, biaya perawatan, biaya panen dan biaya lain-lain serta bahan baku produksi lainnya sesuai kesepakatan, atau dapat menyediakan keduanya.<sup>7</sup>

Ada beberapa faktor menjadi penyebab menguaknya kehadiran petani penggarap, antara lain: (a) petani tidak memiliki lahan; (b) bila saja memiliki lahan tetapi tidak mencukupi kebutuhan; (c) pemilik lahan tidak

---

<sup>6</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012). Hlm. 240.

<sup>7</sup>Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto, 'Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah', *Journal of Sharia Economic Law*, 3.01 (2020), 47.

berkemampuan memproduksi (mengolah) sendiri; dan (d) pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan.

Dalam hal ini pertanian adalah salah satu sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat yang sebagian wilayahnya adalah lahan persawahan, seperti pada Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi. Sebagian besar masyarakatnya adalah petani, khususnya petani padi. Maka sudah biasa terjadi perjanjian bagi hasil dalam penggarapan sawah yang biasa disebut dengan penggarapan sawah secara *mertelu*. Akad kerja sama dengan bagi hasil tersebut biasa dilakukan hanya dengan lisan, tidak secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Karangasri dan rasa saling percaya dengan pembagian keuntungan *mertelu*.<sup>8</sup> Bila tiba masa panen penggaraplah yang menjual hasil panen lalu hasilnya dibagi dua sesuai dengan akadnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelitinya karena itu adalah objek yang penting untuk dibahas berdasarkan kenyataan yang ada. Dalam penelitian ini penulis menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif. Dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM BAGI HASIL DALAM PENGGARAPAN SAWAH DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Sutrisno (petani) pada tanggal 27 Februari 2021

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil perjanjian penggarapan sawah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi ?
2. Bagaimana pembebanan biaya dalam perjanjian penggarapan sawah pada saat gagal panen di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi ?

#### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti sistem perjanjian bagi hasil pertanian dari pengelolaan sawah yang dilakukan oleh petani penggarap di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi
2. Untuk mengetahui pembebanan biaya dalam perjanjian pengelolaan sawah garapan antara petani dan pihak pemilik lahan di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan juga menambah bahan pustaka bagi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah sosial di masyarakat dengan adanya pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi

Kabupaten Ngawi yang tidak sesuai dengan akadnya dan mengetahui Analisis Hukum Islam mengenai pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi

- b. Untuk Fakultas Agama Islam, sebagai tambahan referensi dan bahan kajian serta memperkaya wawasan di bidang kerjasama dan bagi hasil.

#### E. Kajian Pustaka

Skripsi dari Ika Rukmana (2019) berjudul “Pelaksanaan Akad bagi Hasil Penggarapan sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan akad bagi hasil penggarapan sawah di Desa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Plumbon sudah sah menurut Hukum Islam.<sup>9</sup>

Jurnal dari Unggul Priyadi dan Jannahar Saddam Ash (2015) berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Dalam jurnal tersebut meneliti bagaimana sistem perjanjian bagi hasil pertanian di desa tersebut. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Kecamatan Gamping belum

---

<sup>9</sup>Ika Rukmana, “*Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2019.

sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.<sup>10</sup>

Skripsi dari Ulil Amri (2018) berjudul “Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah praktik bagi hasil pertanian (sawal) di desa tersebut sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa praktik bagi hasil pertanian diterapkan oleh masyarakat petani di Desa Palece, tidaklah bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, walaupun mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, hal tersebut dipengaruhi oleh rasa kepercayaan bersama dan arasa kekeluargaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial.<sup>11</sup>

Skripsi dari Mukhammad Sukron (2016) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti bagaimana praktek mukhabarah yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa akad yang dilakukan adalah akad lisan, dalam akad tersebut kesepakatan dibuat bahwa pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya dan biaya penggarapan dari

---

<sup>10</sup>Priyadi, U., & Shidiqie, J. S. A. (2015). Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 15(1), 101-106.

<sup>11</sup>Ulil Amri, “*Praktik Bagi Hasil Pertanian (Sawal) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Masyarakat Petani di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar)*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2018.



petani. Bagi hasil yang dilakukan adalah dengan sistem maro atau dibagi rata antara pemilik sawah dan petani yaitu 50%:50% tanpa dikurangi biaya penggarapan.<sup>12</sup>

Jurnal dari Rizka Nurmadany (2016) berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman”. Dalam jurnal tersebut meneliti bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten tersebut. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. Sehingga mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, tidak ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, serta berakhirnya perjanjian yang tidak dilaporkan oleh kepala desa.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang digunakan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini

---

<sup>12</sup>Mukhammad Sukron, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*”. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

<sup>13</sup>Nurmadany, R. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik Tanah dan Penggarap di Kabupaten Sleman. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.

memerlukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan sumber informasi yang akurat. Dan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan ungkapan apa-apa yang telah dieksplorasi.<sup>14</sup> Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi ataupun gambaran. Mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anatar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, lisan maupun tingkahlaku mereka yang diamati.<sup>15</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.<sup>16</sup> Adapun sumber data dalam peneliti ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.<sup>17</sup> Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada dua yakni :

---

<sup>14</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prana Media Grup, 2014). hlm. 328.

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001). hlm. 205.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hlm. 114

<sup>17</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). hlm. 115-116

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengembalian data langsung pada responden sebagian sumber informasi yang dicari.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktek perjanjian bagi hasil yaitu di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, yang mana ada beberapa orang yang melakukan praktek akad tersebut.

---

<sup>18</sup>Sutrisno Hadi, *Etodologi Research I* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980). hlm. 80.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden. Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Dalam wawancara terdapat jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar tentang hal yang akan ditanyakan. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya adalah pemilik sawah dan penggarap sawah serta yang bersangkutan tentang tema judul skripsi ini yaitu tentang sistem perjanjian bagi hasil penggarapan sawah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Pelaksana dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan bagi hasil sawah.

#### 4. Metode pengelola data

Pengelola data yaitu melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam peneliti. Pengelola data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing data yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.
- b. Sistematisasi data yaitu kegiatan manubulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan di beri tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rangka-rangka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusun data memudahkan analisis data.<sup>19</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>20</sup>

Terdapat dua metode secara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut. Metode deduktif adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan

---

<sup>19</sup>Muhammad.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 334.

kepada kaidah-kaidah dan fenomena yang bersifat umum. Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku Fiqih, Jurnal, buku, dan bersumber lainnya. Metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulannya yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati dari lokasi penelitian.

Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode dedukif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Agar dalam memahami skripsi ini lebih mudah, maka penulis memetakan atau membagi skripsi ini ke dalam lima bab. Masing-masing bab dilengkapi dengan sub babnya sesuai dengan judulnya. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

**BAB I :** Pada bab pertama ini adalah pendahuluan, yang mana penulis akan memaparkan garis-garis besar dan pokok

---

<sup>21</sup> Arikunto.

permasalahan yang melatarbelakangi penelitian. Disamping itu penulis juga akan memaparkan poin-poin dalam pendahuluan ini yaitu; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, penegasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini menerangkan tentang teori-teori atau kerangka teori, yang berkaitan dengan hukum dalam bermuammalah, mulai dari pengertian, syarat dan rukun hingga pendapat Ulama.

BAB III : Dalam bab ini penulis membahas tentang paparan data hasil penelitian tentang perjanjian bagi hasil penggarapan sawah di Desa Karangari, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi. Yang akan dikemukakan adalah tentang proses akad yang dilakukan, hasil panen, pembagian atau prosentase hasil panen, luas tanah yang digarap oleh penggarap, alasan pemilik tanah memberikan manfaat tanahnya, serta masalah yang ada dalam praktek muammalah tersebut yang akan ditemukan dalam penelitian.

BAB IV : Bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian, mulai dari teori sampai dengan menganalisis dimana peneliti mengemukakan “sistem perjanjian bagi hasil penggarapan

sawah di desa Karangasri kecamatan Ngawi kabupaten  
Ngawi”.

BAB V : Bab ini adalah bab terakhir dari keseluruhan isi skripsi,  
dalam bab ini ada tiga pemaparan yaitu ; kesimpulan isi  
skripsi, saran-saran yang konstruktif, serta penutup.